

Dinamika Keamanan Manusia: Pemahaman Holistik terhadap Konflik Rohingya

Hana Sausan

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

hana20016@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendalami dimensi keamanan manusia dalam konteks krisis Rohingya, dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggali sejarah, demografi, dan dinamika politik yang membentuk krisis kompleks di Myanmar dan dampaknya di tingkat regional. Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam, analisis konten, dan pengamatan terhadap situasi lapangan untuk memahami dampak krisis secara holistik. Hasil penelitian menyoroti bahwa penolakan kewarganegaraan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap komunitas Rohingya telah menciptakan tantangan serius terkait keamanan manusia. Ketidakpastian status kewarganegaraan mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, membatasi akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan risiko konflik internal. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang dampak psikologis dan sosial pada masyarakat Rohingya, serta menyoroti aspirasi dan harapan mereka terkait keamanan dan keadilan. Penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan kualitatif, menekankan perlunya respons internasional yang lebih terkoordinasi, perlindungan HAM yang lebih kuat, dan upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis ini. Pendekatan kualitatif membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas krisis Rohingya, memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia; Keamanan Manusia; Krisis Rohingya

Abstract

This study aims to explore the dimensions of human security in the context of the Rohingya crisis, by applying qualitative research methods. This research explores the history, demographics, and political dynamics that form this complex crisis in

Myanmar and their impact at the regional level. The qualitative approach involves in -depth interviews, content analysis, and observation of field situations to understand the impact of the crisis holistically. The results of the study highlight that the rejection of citizenship and human rights violations against the Rohingya community has created serious challenges related to human security. The uncertainty of citizenship status results in social and economic instability, limiting access to education and health services, and increasing the risk of internal conflict. The use of qualitative methods allows a deep understanding of the psychological and social impacts on Rohingya people, as well as highlighting their aspirations and hopes regarding security and justice. This study formulated policy recommendations based on qualitative findings, emphasizing the need for more coordinated international responses, stronger human rights protection, and sustainable development efforts to overcome this crisis. The qualitative approach opens space for a deeper understanding of the complexity of the Rohingya crisis, allows the implementation of more effective and sustainable policy.

Keywords

Human Rights; Human Security; Rohingya Crisis

Pendahuluan

Rohingya, sebuah kelompok etnis dengan kehadirannya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sejak abad ke-7 M, mendapati diri mereka terjerat dalam jaringan penganiayaan dan kekerasan. Konflik ini telah mengakibatkan eksodus pengungsi yang signifikan ke berbagai negara, dengan Indonesia menjadi salah satu di antara negara-negara yang ikut bergulat dengan dampaknya. Demi mengungkap akar konflik ini, dibutuhkan pembelajaran terhadap sejarah rumit di wilayah tersebut yang dibentuk oleh faktor-faktor, seperti pemerintahan kolonial Inggris dan migrasi selanjutnya dari India dan Bangladesh (Susetyo et al., 2013).

Asal-usul krisis Rohingya melacak kembali ke latar belakang sejarah yang begitu kompleks. Warisan kolonialisme Inggris meninggalkan dampak abadi, memengaruhi pola demografis dan hubungan antar-komunikasi. Migrasi berikutnya dari India dan Bangladesh justru semakin memperumit lanskap etno-religius, mengatur panggung untuk ketegangan yang kemudian meletus menjadi kekerasan. Aspek utama dari kesulitan yang dialami Rohingya adalah penolakan kewarganegaraan secara sistematis di Myanmar. Pengecualian ini memperburuk kerentanan mereka dan membuat mereka terpinggirkan dan kehilangan haknya. Perhatian internasional telah tertuju pada pelanggaran besar-besaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang

dihadapi oleh Rohingya, termasuk perpindahan, kekerasan, dan sulitnya akses atas layanan dasar (Nurrachman, 2023).

Efek riak dari krisis Rohingya melampaui perbatasan Myanmar, dengan sejumlah besar mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Indonesia. Perpindahan massa ini menimbulkan tantangan bagi konsep keamanan manusia, karena individu dipaksa untuk menavigasi kompleksitas dunia yang sering gagal dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai. Dalam lanskap kontemporer, krisis Rohingya semakin diperumit oleh peran media sosial. Penyebaran informasi yang salah dan pidato kebencian daring telah berkontribusi pada kelangsungan stereotip dan bias, mengintensifkan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Memahami dan mengatasi dampak platform digital pada krisis sangat penting untuk mengembangkan solusi komprehensif (C. N. N. Indonesia, 2023).

Situasi Rohingya saat ini di Myanmar sangat meresahkan. Sayangnya, keadaan mereka tetap suram, ditandai oleh kurangnya pengakuan dari pemerintah dan penolakan historis kewarganegaraan,

menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan terbesar secara global. Kesulitan yang mengerikan ini telah menyebabkan akses terbatas ke layanan penting, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perawatan kesehatan hingga berdampak pada siklus kemiskinan kronis dan marginalisasi. Letusan kekerasan pada tahun 2017 semakin memperburuk krisis, memaksa ratusan ribu dari total jutaan orang Rohingya untuk melarikan diri dari rumah mereka. Sekitar 600.000 orang secara efektif ditahan oleh otoritas Junta, yang dikenai sistem apartheid, sementara lebih dari 960.000 pengungsi Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh (Human Rights Watch, 2023).

Menggabungkan berbagai tantangan ini, sejak Februari 2021, meningkatnya ketidakstabilan politik dan sosial di Myanmar telah menciptakan hambatan tambahan untuk mencapai repatriasi yang damai. Populasi Rohingya tetap menghadapi rintangan substansial, termasuk isu seputar kewarganegaraan yang tidak ada ujungnya, hak-hak yang kian dibatasi, dan kerentanan terhadap kekerasan dan pelecehan yang terus berlangsung. Angka-angka yang kian mengkhawatirkan dirilis oleh UNHCR pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1,27 juta pengungsi dan pencari suaka, 1,35 juta orang yang

dipindahkan secara internal, dan 600.000 Rohingya tanpa kewarganegaraan sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

Pada tahun 2023, fokus utama UNHCR di Myanmar berada di seputaran bantuan cepat kemanusiaan, memperkuat perlindungan berbasis masyarakat, dan membangun ketahanan bagi orang-orang yang dipindahkan secara internal dan individu yang tidak memiliki kewarganegaraan, termasuk diperkirakan 600.000 Rohingya tanpa kewarganegaraan. Organisasi ini bertujuan untuk berkolaborasi dengan mitra untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembalian Rohingya dengan mengadvokasi pemulihan hak-hak mereka dan mengimplementasikan rekomendasi dari Komisi Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine.

Pada skala regional, UNHCR akan bertahan untuk mengadvokasi untuk akses yang diperluas dan dapat diprediksi ke populasi yang dipindahkan di dalam dan dari Myanmar. Organisasi akan terlibat dengan organisasi berbasis masyarakat untuk memfasilitasi pengiriman bantuan. Selain itu, UNHCR akan terus mengadvokasi hak pengembalian bagi para pengungsi Rohingya dan berkolaborasi dengan pemerintah

Bangladesh beserta seluruh mitra untuk mempertahankan dukungan bagi lebih dari 900.000 pengungsi sekaligus menggabungkan rencana respons bersama untuk krisis kemanusiaan Rohingya.

Di Bangladesh, UNHCR berencana meningkatkan agenda ketahanan dengan memperluas kurikulum Myanmar untuk 12.280 anak-anak di tingkat pra-primer dan kegiatan pengembangan keterampilan dan mata pencaharian untuk 72.000 rumah tangga melalui distribusi kit produksi. Organisasi ini juga akan bekerja dengan mitra untuk mempromosikan alternatif penahanan dan meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan untuk Rohingya di Malaysia dan India melalui inisiatif berbasis masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, UNHCR akan mengintensifkan upaya untuk memfasilitasi solusi negara ketiga bagi para pengungsi Rohingya, memperkuat kapasitas proses permukiman kembali, dan mengadvokasi peningkatan dukungan untuk jalur pelengkap di seluruh wilayah (UNHCR, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas permasalahan Rohingya dapat ditemukan melalui catatan penelitian *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya di Myanmar* oleh M. Angela Merici Siba dan Anggi Nurul Qomari'ah, konflik

antara agama Islam dan Buddha menciptakan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Kebijakan burmanisasi yang hanya mengakui agama Buddha menyebabkan ketidakakuan kewarganegaraan dan serangkaian kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan. Tindakan ini, yang mencapai tingkat genosida, memaksa sebagian warga Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh dan Indonesia. Respons internasional menyerukan penyelesaian konflik yang adil oleh pemerintah Myanmar (Merici Siba & Nurul Qomari'ah, 2018).

Kemudian dalam tinjauan pustaka berjudul *Krisis Rohingya dan Agresi Terpindahkan secara Internasional di Indonesia* yang ditulis oleh Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, S.IP., M.A. dan Dr. Reni Windiani, M.S, penulis menggambarkan dampak konflik Rohingya di Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa konflik luar negeri dapat memanifestasikan diri dalam bentuk tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok di dalam negeri yang dianggap memiliki identitas serupa dengan pelaku di luar negeri. Pola kekerasan ini terutama ditujukan kepada kelompok minoritas di Indonesia yang tidak terlibat dalam konflik di luar negeri, menciptakan berbagai dampak sosial yang merugikan.

Ancaman penutupan paksa terhadap Vihara di Medan, demonstrasi terhadap simbol-simbol keagamaan Buddha, pemukulan seorang biksu Buddha, dan serangan bom di Vihara adalah contoh konkret dari dampak negatif yang diakibatkan oleh krisis Rohingya.

Dalam upaya menjelaskan fenomena agresi terpindahkan ini di Indonesia, penelitian merujuk pada teori Mekanisme Pertahanan yang disebut *Displacement* dalam Psikologi Sosial. Penulis juga menggunakan teori Identitas Sosial untuk menyoroti pandangan reduksionis terhadap afiliasi tunggal yang menciptakan kesenjangan pemahaman antara “diri” dan “orang lain”. Pandangan ini kemudian memberikan dasar bagi bias antarkelompok, di mana individu cenderung lebih memprioritaskan kelompok mereka sendiri (*in-group*) daripada kelompok lain (*out-group*) (Pattipeilhy & Windiani, 2020).

Selanjutnya tinjauan pustaka berjudul *Pencarian Keamanan Rohingya: Pengantar Konsep Keamanan Manusia Melalui Lensa Rohingya* yang ditulis oleh Riana Mardila, penelitian menggambarkan perjalanan Rohingya dalam mencari keamanan, terutama setelah 48 tahun berlalunya Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang secara hukum menghapuskan

kewarganegaraan mereka di Myanmar. Dalam perspektif Hubungan Internasional, perjuangan Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan menjadi tantangan global atau setidaknya regional. Meskipun upaya mereka mencari suaka di negara lain dapat mengancam keamanan negara penerima, tetapi di sisi lain, mereka juga berjuang untuk mendapatkan keamanan dan HAM—dua aspek keamanan yang tidak menyelisihi prioritas kepentingannya. Artikel ini menjadi pengantar konsep Keamanan Manusia yang pertama kali muncul pada tahun 1994. Penulis mencoba menjawab pertanyaan mendasar, yaitu "Bagaimana konsep keamanan manusia dapat menjelaskan masalah Rohingya?" dengan merujuk pada Rohingya sebagai studi kasus.

Melalui penelitian ini, diharapkan poin-poin kunci dapat diidentifikasi berdasarkan penjelasan konsep Keamanan Manusia agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap konflik ini. Dalam konteks globalisasi saat ini, isu Rohingya bukan hanya menjadi tantangan bagi negara atau wilayah tertentu, tetapi juga menjadi tantangan global. Para aktor Hubungan Internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menyelesaikan masalah ketidakamanan manusia yang terjadi. Artikel ini merangkum kompleksitas konflik Rohingya dan mengajak

pembaca untuk melihatnya melalui lensa konsep Keamanan Manusia (Mardila, 2020).

Meskipun penelitian sebelumnya mengulas pelanggaran HAM dan dampak konflik Rohingya di Myanmar serta negara-negara tetangga, kekosongan penelitian masih terlihat pada pemahaman dinamika internal konflik dan faktor lokal yang memperburuk ketidakamanan manusia di tingkat komunitas. Selain itu, kurangnya fokus pada peran aktor Hubungan Internasional dalam menanggapi masalah keamanan Rohingya menjadi celah yang penting untuk diisi. Penelitian baru diharapkan agar dapat lebih mendalam pada aspek keamanan dalam konflik Rohingya, khususnya melihat dinamika internal dan faktor-faktor lokal yang memengaruhi ketidakamanan manusia di tingkat komunitas.

Selain itu, perlu dicari pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas respons internasional terhadap konflik, terutama fokus pada peran organisasi internasional dan negara-negara besar dalam memfasilitasi pelaksanaan solusi jangka panjang demi menciptakan keamanan bagi Rohingya. Dengan demikian, penelitian baru diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih fokus dan berkontribusi pada upaya menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan bagi komunitas Rohingya.

Pembahasan

Metode

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan interpretasi peserta penelitian (Creswell, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas konflik Rohingya melalui sudut pandang subjektif partisipan. Sumber data sekunder, seperti laporan organisasi internasional, literatur akademis, dan publikasi pemerintah, akan digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis. Integrasi konsep Keamanan Manusia dari studi pustaka akan memberikan dasar teoritis untuk mengarahkan pemahaman terhadap dimensi keamanan dalam konteks konflik Rohingya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak konflik pada keamanan komunitas Rohingya. Dengan memahami naratif lokal dan konteks budaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman solusi keamanan yang sesuai dan mendorong respons internasional yang lebih efektif.

Rohingya, kelompok minoritas Muslim terpinggirkan yang tinggal di Myanmar, telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkepanjangan dan mengerikan selama 48 tahun terakhir. Krisis abadi ini telah diperburuk oleh penolakan kewarganegaraan yang sistematis sehingga menjadikan mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan pengakuan hukum di dalam negara tersebut. Kekuatan yang berlarut-larut ini telah membuat komunitas Rohingya mengalami diskriminasi, pengecualian, dan marginalisasi yang parah, melanggengkan kerentanan mereka dan menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar dan sumber daya.

Penolakan

kewarganegaraan, seperti yang dilembagakan oleh kebijakan Myanmar mengakibatkan banyak konsekuensi mengerikan bagi populasi Rohingya. Kurangnya status hukum mereka telah membatasi kebebasan bergerak sekaligus akses terhadap fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang menguntungkan, dan meninggalkan mereka dalam keadaan kerentanan abadi terhadap kekerasan dan eksploitasi. Status tanpa kewarganegaraan Rohingya tidak hanya merusak HAM mendasar mereka, tetapi juga memicu siklus

kemiskinan, keputusan, dan marginalisasi yang melanggengkan krisis kemanusiaan yang mengerikan.

Selain itu, Rohingya telah menghadapi diskriminasi yang meluas, target kekerasan, hingga perpindahan, terutama selama puncak terjadinya kekerasan pada tahun 2017 yang memaksa ratusan ribu di antaranya untuk melarikan diri dari rumah mereka. Banyak yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, seperti Bangladesh dan Indonesia, hingga menambahkan dimensi yang kompleks pada dinamika regional perpindahan dan keamanan manusia.

Penolakan kewarganegaraan yang berlarut-larut dan pelanggaran HAM yang terkait menggarisbawahi kebutuhan mendesak terhadap perhatian internasional yang komprehensif dan upaya bersama untuk mengatasi nasib Rohingya. Komunitas internasional menghadapi tantangan tidak hanya mengutuk pelanggaran ini tetapi juga secara aktif terlibat dengan akar penyebab krisis untuk memastikan pemulihan hak, martabat, dan keamanan mereka. Kegagalan yang terus-menerus dari Rohingya tetap menjadi masalah kritis yang menuntut upaya global yang berkelanjutan menuju resolusi yang adil dan abadi.

Dinamika konflik Rohingya pada tahun 2023 sangat kompleks

dan beragam dengan dipengaruhi oleh kombinasi hubungan antar-komunitas, keluhan etno-demografis, dan situasi keamanan yang berkembang. Di Bangladesh, ketegangan meningkat antara komunitas tuan rumah dan pengungsi Rohingya. Populasi tuan rumah mengungkapkan semakin frustrasi atas dampak buruk yang dirasakan dari kehadiran pengungsi pada kehidupan mereka. Frustrasi ini telah menciptakan lingkungan di mana kekerasan menjadi outlet potensial bagi keluhan, meskipun kepercayaan umum pada lembaga penyelesaian perselisihan lokal. Konflik di Bangladesh bukan hanya hasil dari perbedaan etnis atau agama tetapi diperburuk oleh tantangan ekonomi dan kelangkaan sumber daya. Ketegangan sumber daya lokal karena kehadiran pengungsi Rohingya telah memicu kebencian di antara komunitas tuan rumah, yang menganggap para pengungsi sebagai pesaing untuk peluang terbatas. Meskipun ada beberapa kepercayaan pada mekanisme penyelesaian sengketa lokal, rasa frustrasi yang menyeluruh dapat merusak efektivitas lembaga-lembaga ini.

Secara bersamaan, di Myanmar, konflik antara populasi Buddha dan Rohingya-Muslim terutama didefinisikan oleh keluhan etnis-demografis. Kekhawatiran tentang pertumbuhan populasi yang cepat dan tingkat kesuburan yang

tinggi di antara komunitas Rohingya telah memicu permusuhan lama. Aspek demografis ini menambah lapisan kompleksitas pada konflik, karena terjalin dengan faktor historis dan sosial-politik. Lanskap geopolitik juga memainkan peran penting, dengan aktor regional dan internasional yang terlibat dalam upaya diplomatik dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, menemukan solusi berkelanjutan cukup menantang, mengingat kompleksitas yang telanjur mengakar dalam dan pengaruh militer yang berkelanjutan di Myanmar. Terhadap latar belakang ini, situasi keamanan yang berkembang semakin memperumit upaya resolusi. Wabah kekerasan sporadis mengganggu segala upaya rekonsiliasi, dan pengaruh militer menambah lapisan kompleksitas tambahan pada situasi yang sudah menantang.

Mengatasi konflik Rohingya pada tahun 2023 membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan kemanusiaan langsung, tetapi juga faktor sosial-politik, ekonomi, dan demografis yang mendasari ketegangan. Kerja sama internasional, inisiatif diplomatik, dan upaya untuk mempromosikan pemahaman antar-masyarakat sangat penting untuk membuka jalan bagi masa depan yang lebih stabil dan

inklusif di wilayah tersebut (Macdonald et al., 2023).

Dampak keamanan manusia pada komunitas Rohingya meluas di berbagai dimensi, memanifestasikan tantangan bagi negara tuan rumah, Bangladesh, dan pengungsi Rohingya yang rentan. Bagi Bangladesh, masuknya pengungsi Rohingya secara signifikan meningkatkan masalah keamanan manusia. Negara ini menghadapi tugas rumit untuk menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan keharusan untuk mengatasi masalah keamanan manusia yang mempengaruhi populasi Rohingya.

Skala krisis Rohingya telah diakui sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas internal Bangladesh, memberikan tekanan besar pada pemerintah untuk menavigasi situasi yang kompleks dan menantang. Terlepas dari tantangan yang ada, pemerintah Bangladesh memperoleh banyak pujian dari dunia internasional atas kebaikan hatinya memberi perlindungan pada para pengungsi Rohingya, menyoroti komitmen negara terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun, penyediaan tempat tinggal hanyalah satu aspek dari masalah yang lebih luas. Kehadiran sejumlah besar pengungsi Rohingya di dalam perbatasan

Bangladesh juga telah menghasilkan tantangan hukum dan ketertiban.

Ketegangan antara komunitas tuan rumah dan pengungsi Rohingya telah muncul sebagai konsekuensi yang signifikan. Ketegangan pada sumber daya lokal, persaingan ekonomi, dan persepsi dampak negatif pada kehidupan masyarakat tuan rumah telah berkontribusi pada lingkungan sosial yang kompleks. Kompleksitas ini terkadang memengaruhi situasi hukum dan ketertiban, menggarisbawahi sifat rumit dari mengelola koeksistensi beragam populasi dalam ruang terbatas. Intinya, krisis Rohingya di Bangladesh menerangi interaksi yang rumit antara kepentingan nasional, pertimbangan keamanan manusia, dan keseimbangan secara halus yang diperlukan untuk menavigasi tantangan yang ditimbulkan dengan menjadi tuan rumah populasi pengungsi yang besar.

Sementara pujian internasional diterima untuk menyediakan tempat berlindung, menangani masalah-masalah yang beragam, termasuk ketegangan antar-masyarakat. Hal ini tentu sangat penting dalam rangka mendorong stabilitas jangka panjang guna memastikan kesejahteraan kedua belah pihak, baik pengungsi Rohingya dan negara tuan rumah. Dinamika situasi ini

menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dan bernuansa terhadap keamanan manusia yang melampaui ketentuan penampungan langsung untuk mengatasi dimensi sosial-politik dan ekonomi krisis yang lebih luas (Islam, 2018).

Kerentanan yang meningkat dari para pengungsi Rohingya memaparkan mereka pada bahaya eksploitasi oleh penyelundup dan pedagang manusia, menggarisbawahi tantangan kompleks yang terkait dengan perpindahan mereka. Meningkatnya kerentanan populasi Rohingya, didorong oleh perpindahan paksa dan kondisi kehidupan yang mengerikan, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh individu yang tidak bermoral dan jaringan kriminal. Perjalanan berbahaya dari Myanmar ke negara-negara tetangga, sering dilakukan dalam keadaan putus asa, menempatkan mereka pada risiko menjadi mangsa penyelundup manusia yang mengeksploitasi kerentanan mereka untuk keuntungan finansial. Eksploitasi ini berkisar dari praktik perburuan paksaan hingga perdagangan manusia, semakin memperparah kesulitan yang dihadapi oleh komunitas yang sudah terpinggirkan.

Pendekatan berorientasi keamanan yang dominan dalam menangani krisis pengungsi

Rohingya telah menambahkan lapisan kompleksitas lain. Melihat masuknya pengungsi Rohingya semata-mata melalui lensa keamanan mencirikan mereka sebagai ancaman potensial, beban ekonomi, dan bahkan tantangan budaya. Pembimbingan ini tidak hanya memengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi juga membentuk persepsi publik, menciptakan lingkungan yang mendorong sikap negatif terhadap para pengungsi. Sekuritisasi krisis Rohingya berkontribusi pada persepsi yang lebih merugikan tentang populasi pengungsi dan memperburuk kerentanan mereka. Ketika pengungsi dianggap sebagai masalah keamanan, hal itu dapat menyebabkan kebijakan yang membatasi, peningkatan pengawasan, dan akses terbatas ke layanan penting. Langkah-langkah semacam itu tidak hanya gagal untuk mengatasi akar penyebab krisis, tetapi juga memperdalam tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Selain itu, persepsi negatif yang berasal dari pendekatan keamanan sentris dapat mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi sosial, semakin meminggirkan para pengungsi Rohingya. Hal ini memperkuat kerentanan mereka terhadap eksploitasi karena didorong ke pinggiran masyarakat dengan

perlindungan hukum dan bantuan yang terbatas.

Mengatasi dinamika kompleks, krisis pengungsi Rohingya membutuhkan pergeseran dari pendekatan yang hanya berorientasi keamanan semata-mata dengan menggabungkan perspektif kemanusiaan, sosial ekonomi, dan hak asasi manusia. Strategi yang komprehensif tidak hanya fokus pada masalah keamanan secara langsung, tetapi juga mengatasi akar penyebab kerentanan serta menumbuhkan lingkungan yang dapat meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan Rohingya. Pendekatan semacam itu sangat penting dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang melampaui langkah-langkah keamanan jangka pendek untuk memastikan stabilitas dan ketahanan jangka panjang dari komunitas yang dipindahkan (Pudjibudojo, 2019).

Konflik antara populasi Buddhis dan Rohingya-Muslim di Myanmar berakar dalam pada keluhan etno-demografis, khususnya kekhawatiran tentang pertumbuhan populasi yang cepat dan tingkat kesuburan yang tinggi di antara komunitas Rohingya. Dimensi demografis ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan ketegangan dan berkontribusi pada konflik yang berlarut-larut. Situasi ini semakin diperburuk karena

kemunculan kelompok militan dan kriminal Rohingya, menimbulkan ancaman baru terhadap stabilitas wilayah dan kesejahteraan para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kompetisi di antara aktor bersenjata telah menambahkan lapisan kompleksitas lain ke dalam krisis Rohingya. Persaingan yang berkembang antara kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Angkatan Darat Arakan (AA) dan militer, telah menyebabkan lonjakan kekerasan dan kejahatan di antara para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ini tidak hanya meningkatkan kerentanan populasi pengungsi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan dan hak mereka. Selain itu, konflik antara AA dan militer telah menciptakan situasi yang berbahaya, dengan implikasi potensial bagi rezim untuk mengeksploitasi ketegangan antara komunitas Rakhine dan Rohingya untuk keuntungan politik.

Mengingat tantangan-tantangan ini, terbukti bahwa dampak keamanan manusia pada komunitas Rohingya beragam. Kerentanan pengungsi Rohingya diperparah oleh keluhan etno-demografis, aktivitas kelompok bersenjata, dan dinamika geopolitik yang kompleks yang berperan. Mengatasi masalah-masalah ini mengharuskan pendekatan yang lebih humanistik untuk kebijakan pengungsi, bergerak

melampaui perspektif yang berorientasi keamanan semata-mata. Strategi yang komprehensif harus melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik, termasuk keluhan etno-demografis, dan berupaya mengurangi dampak kelompok bersenjata yang bersaing (IISS Myanmar Conflict Map, 2023).

Dalam menganalisa konflik Rohingya dapat diteliti dengan lensa human security atau keamanan manusia. Keamanan manusia adalah pendekatan keamanan yang berpusat pada individu, menekankan kesejahteraan orang atas kepentingan negara. Ini membahas spektrum ancaman yang luas, mencakup masalah -masalah seperti kemiskinan, penyakit, degradasi lingkungan, dan kekerasan politik. Berasal dari paradigma holistik pembangunan manusia, terutama yang diperjuangkan oleh Mahbub UL HaQ di UNDP, konsep ini muncul sebagai alat analitik untuk memastikan keamanan bagi individu di berbagai sektor. Ini mencari solusi yang relevan secara kontekstual dan advokat untuk kemitraan dalam rangka menciptakan dunia yang bebas dari ketakutan, keinginan, dan penghinaan. Pendekatan keamanan manusia berfungsi sebagai kerangka kerja analitik dan perencanaan yang terbukti, memfasilitasi tanggapan komprehensif dan pencegahan dari komunitas internasional. Namun, para kritikus berpendapat bahwa

ketidakjelasan nya mengurangi efektivitas, bahwa itu sering digunakan sebagai platform untuk aktivisme, dan bahwa ia tidak memiliki kejelasan dalam membantu komunitas penelitian dan pembuat keputusan dalam memahami makna dan implikasi keamanan (Tadjbakhsh, 2005).

Studi kasus dari krisis kemanan manusia dapat kita lihat dari kondisi etnis Rohingya di Bangladesh. Komunitas Rohingya di Bangladesh menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk situasi ketertiban, tekanan demografis, isu lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan pendidikan-kesehatan. Keberadaan pengungsi Rohingya meningkatkan keprihatinan keamanan manusia di Bangladesh, dengan krisis Rohingya diidentifikasi sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas internal negara. Pengungsi Rohingya juga rentan dieksploitasi oleh penyelundup dan penjahat karena kerentanannya yang tinggi. Persaingan antar kelompok bersenjata dan lonjakan kekerasan di antara pengungsi Rohingya memperbesar kerentanannya.

Situasi di kamp Rohingya kompleks dan multiaspek, dengan berbagai faktor yang berkontribusi pada potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Rohing3yas

terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Penting bagi semua pihak terlibat untuk bekerja sama mencari solusi berkelanjutan yang mengatasi keamanan dan kesejahteraan komunitas Rohingya (Sakib, 2023).

Simpul an

Krisis Rohingya menunjukkan kompleksitas tantangan keamanan manusia yang dihadapi oleh kelompok etnis tertentu. Penolakan kewarganegaraan dan pelanggaran HAM memperburuk kondisi krisis, menciptakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada Myanmar, tetapi juga menciptakan tantangan bagi negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia. Penanganan krisis memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan upaya bersama dari masyarakat internasional untuk mengatasi akar penyebab, memastikan hak-hak dasar, dan menciptakan lingkungan yang mendukung repatriasi damai dan inklusi komunitas Rohingya. Solusi jangka panjang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks sejarah, politik, dan sosial, serta kolaborasi yang erat antara aktor lokal dan internasional.

Daftar Pustaka

C. N. N. Indonesia. (2023). *Sejarah Konflik Rohingya, Kenapa Sampai Diusir dari Myanmar?* internasional.

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231229194830-106-1043346/sejarah-konflik-rohingya-kenapa-sampai-diusir-dari-myanmar>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 3rd ed (pp. xxix, 260). Sage Publications, Inc.
- Human Rights Watch. (2023, August 20). *Future Bleak for Rohingya in Bangladesh, Myanmar* | Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2023/08/20/future-bleak-rohingya-bangladesh-myanmar>
- IISS Myanmar Conflict Map. (2023). *Competing armed groups pose new threat to Rohingya in Bangladesh*. <https://myanmar.iiss.org/analysis/rohingya>
- Islam, T. (2018, May 15). Considering the consequences for human security: The influx of Rohingya refugees in Bangladesh. *South Asia@LSE*. [https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/15/considering-the-consequences-for-](https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/15/considering-the-consequences-for-human-security-the-influx-of-rohingya-refugees-in-bangladesh/)
- [human-security-the-influx-of-rohingya-refugees-in-bangladesh/](https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/15/considering-the-consequences-for-human-security-the-influx-of-rohingya-refugees-in-bangladesh/)
- Macdonald, G., Mekker, I., & Mooney, L. (2023). Conflict Dynamics between Bangladeshi Host Communities and Rohingya Refugees. *UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE*.
- Mardila, R. (2020). ROHINGYA'S IN SEARCH FOR SECURITY: AN INTRODUCTION TO HUMAN SECURITY CONCEPT THROUGH ROHINGYA' LENS. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17107>
- Merici Siba, M. A., & Nurul Qomari'ah, A. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jiw.p.2221>
- Nurrachman, A. (2023, December 19). Rohingya: Sejarah dan Asal-Usulnya. *Kompaspedia*.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya>

Pattipeilhy, S. C. H., & Windiani, R. (2020). THE ROHINGYA CRISIS AND INTERNATIONAL DISPLACED AGGRESSION IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.3306.243-257>

Pudjibudojo, W. P. (2019). Criticizing the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 229. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.211-219>

Sakib, A. B. M. N. (2023). Rohingya Refugee Crisis: Emerging Threats to Bangladesh as a Host Country? *Journal of Asian and African Studies*, 00219096231192324. <https://doi.org/10.1177/00219096231192324>

Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, R. M. (2013). *Rohingya: Suara etnis yang tak boleh*

bersuara. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM).

Tadjbakhsh, S. (2005). *Human Security: Concepts and Implications*.

UNHCR. (2023). *Myanmar situation—Global Appeal 2023*. Global Focus. <https://reporting.unhcr.org/myanmar-situation-global-appeal-2023>